**Pj BUPATI BARITO UTARA PAPARKAN EVALUASI KINERJA DI ITJEN KEMENDAGRI**

*Sumber gambar: https://kalteng.antaranews.com*

Muara Teweh (ANTARA) - Penjabat Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, Muhlis kembali menyampaikan paparan evaluasi kinerja untuk triwulan II di hadapan tim evaluator yang terdiri dari para pejabat utama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) RI di ruang rapat utama gedung Itjen Kemendagri di Jakarta, Jumat. Pada kesempatan itu Pj Bupati Barito Utara Muhlis didampingi Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Jufriansyah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ir Inriaty Karawaheni, Kepala Dinas Kesehatan Pariadi, Kepala Dinas Diskominfosandi M Iksan, Kepala Dinas Budparpora Hj Annisa Cahyawati.

Kemudian, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Suparmi A Aspian, Kepala Dinas DaldukKB dan P3A Silas Patiung, Sekretaris Dinas Pendidikan Sunarti, Kabag Pemerintahan Setda Barito Utara Bahrum Girsang, Direktur RSUD dr Tiur Maida, dan Kabid Dinas PMPTSP Zulkarnaen. Evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Kemendagri kepada penjabat kepala daerah merupakan penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan dan capaian hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh penjabat kepala daerah setiap tiga bulan. Dalam evaluasi kinerja triwulan II tersebut, Muhlis menyampaikan paparan 10 indikator yang menjadi obyek evaluasi, diantaranya, inflasi, penanganan stunting, BUMD, layanan publik, pengangguran, kemiskinan ekstrem, kesehatan, penyerapan anggaran, kegiatan unggulan dan perijinan.

Berdasarkan paparan kinerja triwulan II dan rencana strategis pembangunan yang disampaikan Pj Bupati Barito Utara, tim evaluator menilai Pj Bupati Barito Utara telah melakukan capaian kinerja yang baik serta sesuai arahan yang telah disampaikan dan evaluasi pada saat rapat asistensi beberapa waktu lalu.

Di samping itu pula ada beberapa masukan yang disampaikan tim evaluator kepada pada Pj Bupati Barito Utara dalam rangka meningkatkan 10 aspek prioritas, seperti hal-hal yang sifatnya masih belum optimal diberikan arahan dan pembinaan sehingga harapannya capaian kinerja bisa terlaksana dengan baik dan optimal. Terima kasih atas

penilaian yang diberikan oleh tim evaluator Itjen Kemendagri. Kami akan terus berkomitmen untuk terus bekerja keras dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Barito Utara. Evaluasi menjadi landasan untuk perbaikan dan peningkatan langkah-langkah strategis untuk ke depannya," kata Pj Bupati Muhlis juga menyebut kinerjanya ini tidak lepas dari berkat kekompakan dan kerja keras dari seluruh organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam menjalankan tupoksinya masing-masing.

**Sumber Berita:**

1. https://kalteng.antaranews.com/berita/688206/pj-bupati-barito-utara-paparkan-evaluasi-kinerja-di-itjen-kemendagri, Sabtu 6 April 2024
2. https://www.borneonews.co.id/berita/336091-pj-bupati-barito-utara-paparkan-evaluasi-kinerja-di-itjen-kemendagri, Minggu 7 April 2024

**Catatan:**

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2014 mengatur bahwa:

(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.
(2) Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan diketuai oleh gubernur untuk Daerah provinsi, oleh bupati/wali kota untuk Daerah kabupaten/kota, dan oleh camat untuk Kecamatan.
(3) Anggota Forkopimda provinsi dan Forkopimda kabupaten/kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
(4) Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
(5) Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.